

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Idhil Adha

NPP.30.1200

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Publik

Email: ldhiladha05@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The comparison between the small regional original income and the large amount of transfer income on financial performance makes Makassar City still dependent on transfer income. **Purpose:** This study aims to analyze the financial performance of the local government of Makassar City for the 2017-2021 fiscal year, find out the inhibiting factors in implementing financial performance, explain efforts in implementing financial performance. **Method:** The method used in this paper is descriptive qualitative with an inductive approach. The data used in this writing is the Makassar City APBD Realization Report as secondary data and primary data, namely the results of interviews from informants at the Makassar City BPKAD. Data analysis uses data reduction analysis method, data presentation, data description through financial ratio analysis and withdrawal. **Results/Findings:** The results of this study show that the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization in the city of Makassar is not less than 40% which is categorized as moderate, the analysis of the regional dependency ratio is 60% including the percentage > 50.00. The calculation of the high contribution of transfer income to regional income shows that the regional dependence of Makassar City is very high. Regional independence ratio analysis shows figures ranging from 50-75%. This means that for 5 years the regional independence of the Makassar City Government is categorized as moderate with a participatory relationship pattern. Analysis of the effectiveness ratio of Regional Original Revenue receipts for 2017 and 2020 shows the effectiveness of managing PAD in the range of 90% - 99% indicating quite effective criteria. The years 2018, 2019 and 2021 show ratio results ranging from 75% - 89% which means that the criteria are less effective for PAD management. **Conclusion:** To overcome this problem, the researcher's suggestions are to re-optimize the increase in the intensification and extensification of income sources according to the existing potential, optimizing regional tax revenues and regional levies, Strengthening regional original income through normative efforts that improve procedures for collecting regional original income to become efficient.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Perbandingan antara pendapatan asli daerah yang kecil dengan besarnya pendapatan transfer terhadap kinerja keuangan menjadikan Kota Makassar masih bergantung pada pemasukan pendapatan transfer. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Makassar tahun anggaran 2017-2021, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja keuangan, menjelaskan upaya dalam pelaksanaan kinerja keuangan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Laporan Realisasi APBD Kota Makassar sebagai data sekunder dan data primer yaitu hasil wawancara dari Informan yang ada di BPKAD Kota Makassar. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, deskripsi data melalui analisis rasio keuangan dan penarikan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi desentralisasi fiskal di kota makassar yaitu tidak kurang dari 40% yang dikategorikan sedang, analisis rasio ketegantungan daerah sebesar 60% termasuk pada presentase >50,00. Perhitungan kontribusi pendapatan transfer yang tinggi terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa ketergantungan daerah Kota Makassar sangat tinggi. Analisis rasio kemandirian daerah menunjukkan angka yang berkisar pada 50-75%. Artinya selama 5 tahun kemandirian daerah Pemerintah Kota Makassar dikategorikan sedang dengan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Analisis rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD berkisar 90% - 99% menunjukkan kriteria cukup efektif. Tahun 2018,2019 dan 2021 menunjukkan hasil rasio yang berkisar 75% - 89% berarti kriteria yang kurang efektif untuk pengelolaan PAD. **Kesimpulan:** Untuk mengatasi permasalahan tersesebut saran peneliti yakni dengan mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang ada, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Menguatkan pendapatan asli daerah melalui upaya normatif yang membenahi prosedur pemungutan pendapatan asli daerah menjadi efisien.

Kata kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat mempunyai kewajiban berpartisipasi langsung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui transfer ke daerah. Anggaran yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat berkontribusi pada desentralisasi keuangan yang mengiringi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Akan tetapi, kebijakan akan desentralisasi fiskal tidak bisa terus diandalkan oleh setiap pemerintah daerah terus menerus.

Keuangan daerah merupakan salah satu dari beberapa kriteria pemerintah untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Fokusnya adalah pada daerah yang dapat membiayai operasi pemerintah dengan diikuti besarnya peningkatan ketergantungan pada pemerintah pusat dan bagian yang menurun. Pemerintah pusat dalam hal ini tentu saja tidak selamanya memprioritaskan kebutuhan pemerintah daerah dengan penuh. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi setiap daerah dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah dan atau dana perimbangan merupakan beberapa dari kebanyakan unsur dalam APBD yang bisa digunakan sebagai suatu indikator untuk menentukan kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kontribusi antara pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap pendapatan daerah yang akan menentukan seberapa besar kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah tabel kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kota makassar:

Tabel 1. 1

Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH (RP)	PENDAPATAN TRANSFER (RP)	KONTRIBUSI PENDAPATAN TRANSFER (%)
1.	2017	3.416.355.218.701,10	2.047.105.605.669,00	59,92
2.	2018	3.428.479.729.162,65	2.098.135.622.513,00	61,19
3.	2019	3.666.359.990.154,91	2.212.978.024.448,00	60,35
4.	2020	3.323.662.286.602,28	2.053.495.450.619,00	61,78
5.	2021	3.286.048.497.393,93	1.979.478.474.976,00	60,23

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Berdasarkan hasil data yang telah diolah diatas, yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi atas pendapatan transfer pada tahun 2017-2021 terjadi kenaikan dan penurunan yang berkala pada total pendapatan daerah kota makassar. Perihal yang sama terjadi pada dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah kota makassar rata-rata kontribusi dana perimbangan atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat lebih besar. Kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai angka 60% yang diartikan memiliki peran dalam menunjang pelaksanaan urusan otonomi daerah di kota makassar.

Tabel 1. 2
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (%)
2017	3.416.355.218.701,10	1.484.865.937.000,00	42,21
2018	3.428.479.729.162,65	1.503.411.219.000,00	38,62
2019	3.666.359.990.154,91	1.624.776.235.586,00	40,06
2020	3.323.662.286.602,28	1.144.166.180.881,00	32,98
2021	3.286.048.497.393,93	1.326.375.011.303,82	37,07

Sumber: BPKAD Kota Makassar

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa kontribusi pendapatan asli daerah mengalami hal yang sama dengan pendapatan daerah dengan status mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, maka kontribusi yang bisa diberikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 38% secara rata rata.

1.2. Ketimpangan hasil pendapatan yang menjadi masalah

Perbandingan antara kedua pendapatan tersebut bisa dilihat bahwa pendapatan transfer lebih berkontribusi ketimbang pendapatan asli daerah. yang dapat dipandang perbandingan angkanya antara keduanya yaitu 48% untuk kontribusi dana perimbangan dan 38% untuk pendapatan asli daerah dari kota makassar. Perbandingan kedua kontribusi ini sudah merupakan simpang siur yang merupakan contoh permasalahan kota makassar dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah masih belum bisa tanpa pendapatan transfer. Tergambarkannya kecenderungan Kota Makassar yang terlihat masih bergantung pada dana perimbangan atau pendapatan transfer pemerintah kota makassar terlihat belum bisa melaksanakan otonomi daerah tanpa bantuan dari pusat.

Sumber dari pendapatan asli daerah yang difokuskan oleh pemerintah daerah merupakan perolehan dari suatu pemerintah daerah dalam membiayai suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan masyarakat agar bisa sejahtera. Keempat unsur ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk memaksimalkan kebutuhan daerah. Jika ditelaah lebih lanjut, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing dalam mengupayakan penerimaan yang tetap dari hasil potensi daerah itu sendiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama Sri ayu febrianti,dahliah, Bahar Sinring (Universitas Muslim Indonesia,2019) dalam Analisis Kemampuan keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jeneponto (2014-2018) ditemukan kemampuan keuangan kabupaten Jeneponto masih sangat kurang. Jumlah rata-rata rasio kemandirian keuangan hanya sebesar 6.25% dengan pola instruktif dan rasio derajat desentralisasi diskal sebesar 5,80% terbilang sangat kurang. Penelitian kedua Fitiri Umi Hanik (Politeknik Negeri Semarang,2014) dalam Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai penilaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009-2013 ditemukan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Terlihat dari rasio efektivitas mempunyai angka sebesar 100,14% berarti pemungutan PAD cenderung efektif. Rasio efisiensi dengan rata-rata 0,76% dikatakan sudah efisien dalam mengeluarkan biaya untuk memungut PAD secara maksimal. Berbanding terbalik pada rasio kemandirian daerah dengan angka 14,82% menunjukkan kinerja keuangan belum baik. Penelitian ketiga oleh Deuis Kartika (Universitas Juaafa Bogor,2016) dalam Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi (Tahun 2009-2013) ditemukan rasio kemandirian kabupaten sukabumi masih sangat rendah hanya mencapai angka 5,62% yang menunjukkan pola instruktif yaitu masih sangat rendah. Rasio efektivitas mencapai rata-rata sebesar 105,67% menunjukkan sangat efektif. Rasio efisiensi tergolong sangat efisien mencapai angka rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.

1.4. Pernyataan kebaruan ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menganalisis kemampuan keuangan daerah kinerja keuangan provinsi Sulawesi Selatan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan teori Analisis Rasio Keuangan yang dikemukakan oleh Mahmudi pada tahun 2019 yang kemudian hasil yang ingin dicapai adalah untuk melihat tingkat kinerja keuangan daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap Kinerja keuangan suatu daerah. Harapannya melalui tulisan penelitian ini dapat memberikan perkembangan khasanah keilmuan pemerintahan khususnya keuangan sektor publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna menjadi bahan tinjauan bagi penelitian di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah.

2. METODE

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 13) penelitian dengan metodologi penelitian kualitatif, maka lebih bersifat deskriptif. Berdasarkan berbagai tanggapan para ahli di atas, maka dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif atau dikenal dengan istilah asing yakni descriptive research merupakan salah satu dari beberapa jenis desain penelitian yang mampu memberikan gambaran maupun uraian dengan detail dan sejelas-jelasnya tanpa ada perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi penulis bisa membahas dan mengolah data statistik yang memuat informasi tentang objek yang diteliti. Jadi data statistik bisa digunakan dan diolah dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian dan lebih tepatnya memperkaya informasi yang ingin disampaikan maupun mempertajam analisis kualitatif itu sendiri. Pada sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Sumber data sekunder diperoleh berdasarkan observasi penulis dan penelitian kepustakaan. Dikatakan data sekunder bisa berasal dari dokumen grafik formulir, catatan, SMS, foto dan lain-lain. Informan atau orang yang memberikan informasi dibutuhkan dalam memperoleh berbagai keterangan melalui wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. dalam penelitian ini penulis sendiri menjadi instrumen penulisan guna menemukan data-data secara langsung di lapangan. Dilakukan dengan terjun secara langsung kepada lokasi penelitian yakni tempat penelitian berlangsung. Selain itu dalam penelitian ini secara umum, terdapat 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar

Mengukur kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan kota makassar dalam meningkatkan potensi Kota

Makassar. Pengukuran kinerja dilakukan dengan beberapa variabel sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio yang mampu menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai otonomi daerah. Rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka derajat desentralisasi mampu menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar. Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Makassar:

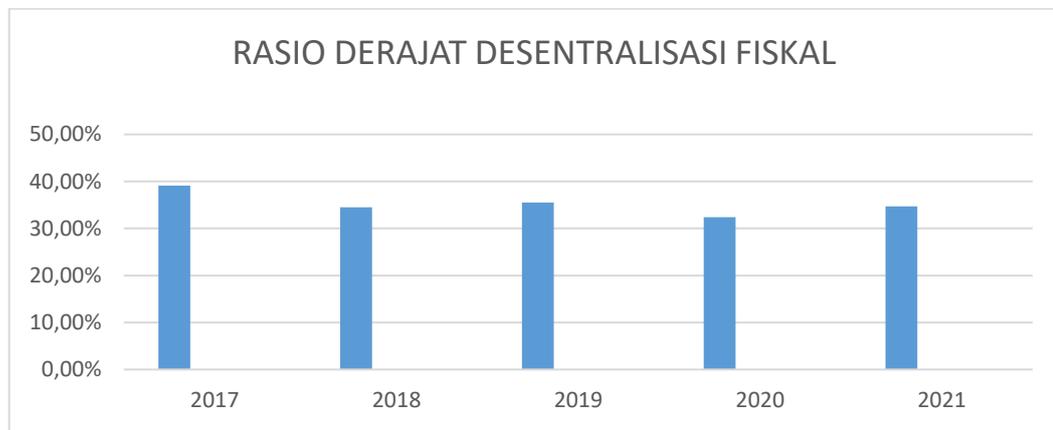
$$2017 = \frac{1.337.231.094.232}{3.416.355.218.701} \times 100\% = 39,1\%$$

$$2018 = \frac{1.185.453.010.989}{3.428.479.729.162} \times 100\% = 34,5\%$$

$$2019 = \frac{1.303.316.337.553}{3.666.359.990.154} \times 100 = 35,5\%$$

$$2020 = \frac{1.078.328.561.269}{3.323.662.286.602} \times 100\% = 32,4\%$$

$$2021 = \frac{1.140.328.483.697}{3.286.048.497.393} \times 100\% = 34,7\%$$



Sumber: diolah penulis

Gambar 4. 1
Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa selama 5 tahun Derajat Desentralisasi daerah tidak mampu melewati angka 40% menurut perhitungan rasio. Selama 5 tahun anggaran juga derajat desentralisasi fiskal Kota Makassar tidak stabil mengakibatkan grafik naik dan turun. Mulai dari tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan angka 39,1% derajat desentralisasinya. Penurunan terjadi pada tahun 2018 dengan terjun pada angka 34,5% dari desentralisasi fiskal. Tumbuh kembali pada tahun 2019 dengan menghasilkan derajat desentralisasi fiskal sebesar 35,5%. Tahun 2020 jatuh kembali hingga turun pada angka 32,4% yang merupakan pencapaian paling rendah Kota Makassar. Kembali naik pada tahun 2021 yang berhasil mendaki sebesar 34,7% untuk tahun terakhirnya. Fenomena atas tren selama 5 tahun atas derajat desentralisasi fiskal di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh kontribusi PAD yang tidak stabil. Terjadi penurunan presentase realisasi PAD sejak tahun 2017 yang merupakan tahun pertama selama tren 5 tahun tersebut.

b. Rasio Ketergantungan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatn eksternal khususnya pendapatan transfer. Cara perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan. Pengukuran mampu memperkuat hasil dari perhitungan kemandirian daerah. Rasio ini menunjukan seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Semakin rendah hasil rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin kecil ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pusat dan/atau pemerintah daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui dengan membandingkan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan. Berikut ini perhitungan dan hasil rasio ketergantungan daerah Kota Makassar:

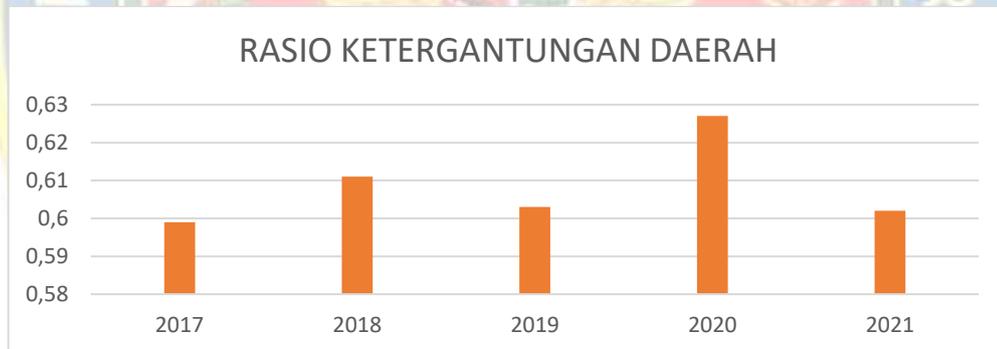
$$2017 = \frac{2.047.105.605.669}{3.416.355.218.701} \times 100\% = 59,9\%$$

$$2018 = \frac{2.098.135.622.513}{3.428.479.729.162} \times 100\% = 61,1\%$$

$$2019 = \frac{2.212.978.024.448}{3.666.359.990.154} \times 100 = 60,3\%$$

$$2020 = \frac{2.053.495.450.619}{3.323.662.286.602} \times 100\% = 62,7\%$$

$$2021 = \frac{1.979.478.474.976}{3.286.048.497.393} \times 100\% = 60,2\%$$



Sumber: diolah penulis

Gambar 4. 2
Perbandingan Rasio Ketergantungan Daerah

Berdasarkan gambaran grafik diatas menunjukkan perkembangan ketergantungan daerah selama 5 tahun. Perkembangan ketergantungan daerah selama 5 tahun mengalami fluktuasi naik dan turun. Ketergantungan paling rendah dialami pada tahun 2017 dengan angka 59,9%. Memanjat naik pada tahun 2018 dengan presentase ketergantungan sebesar 61,1%. Tahun 2019 berkurang kembali ketergantungannya dengan angka 60,3%. Tahun 2020 ketergantungan naik lagi 2% dengan angka 62,7% yang ditandai paling tinggi selama 5 tahun. Pada tahun terakhir Pemerintah Kota

Makassar bisa menurunkan tingkat ketergantungannya terjun dengan angka 60,2%.

c. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah sejauh mana ketergantungan terhadap dana eksternal meliputi transfer pusat, provinsi, dan pinjaman pada Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pengukuran atas rasio kemandirian keuangan daerah komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibandingkan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dengan penerimaan pendapatan yang berasal dari pihak eksternal yaitu pendapatan yang berasal dari sumber lain selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan eksternal sendiri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi serta pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat, tranfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio ini maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah yaitu dengan cara membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan eksternal. Berdasarkan rumus di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi patokan di dalam kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dibandingkan dengan komponen lain, yaitu pendapatan yang bersumber dari pihak eksternal pemerintah daerah. Berikut merupakan perhitungan rasio dan grafik atas kemandirian daerah Kota Makassar selama 5 tahun:

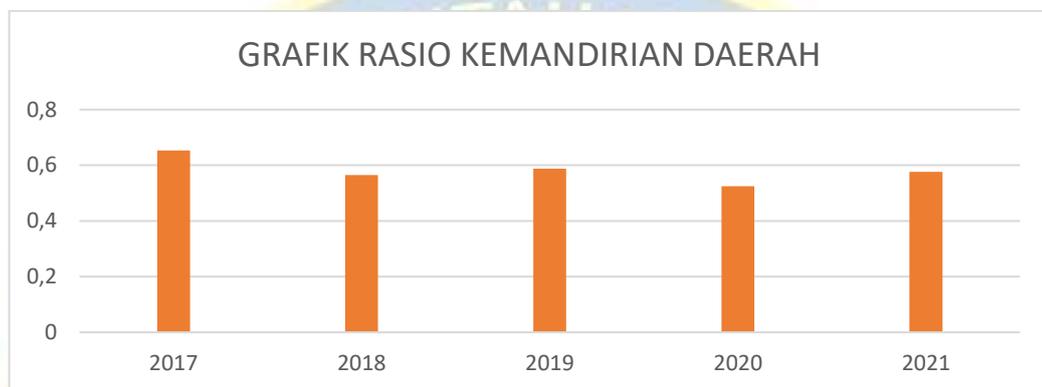
$$2017 = \frac{1.337.231.094.232}{2.047.105.605.669} \times 100\% = 65,3\%$$

$$2018 = \frac{1.185.453.010.989}{2.098.135.622.513} \times 100\% = 56,5\%$$

$$2019 = \frac{1.303.316.337.553}{2.212.978.024.448} \times 100 = 58,8\%$$

$$2020 = \frac{1.078.328.561.269}{2.053.495.450.619} \times 100\% = 52,5\%$$

$$2021 = \frac{1.140.328.483.697}{1.979.478.474.976} \times 100\% = 57,6\%$$



Sumber: diolah penulis

Gambar 4. 3

Perbandingan Rasio Kemandirian Daerah

Data diatas merupakan hasil perhitungan rasio dan grafik tren selama 5 tahun atas kinerja keuangan Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio selama tahun keseluruhan menunjukkan angka yang berkisar pada 50-75%. Artinya selama 5 tahun kemandirian daerah Pemerintah Kota Makassar dikategorikan sedang dengan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Grafik kemandirian daerah Kota Makassar juga menunjukkan fluktuasi yang naik turun setiap tahunnya. Kemandirian yang tinggi pada tahun 2017 dengan presentase angka sebesar 65,3%. Turun pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 56%. Tahun 2019 sedikit tumbuh dengan presentase angka sebesar 58,8%. Kemandirian yang rendah terletak pada tahun 2020 dengan presentase angka sebesar 52,5%. Pada tahun terakhir Pemerintah Kota Makassar tumbuh kembali kemandirannya dengan angka 57,6%. Gambaran data diatas menunjukkan bahwa Kemandirian Kota Makassar masih bisa dikatakan sedikit mandiri berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian daerah.

d. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menunjukan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan sehingga

realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan didasarkan potensi rill daerah. Apabila rasio efektivitas tersebut tinggi maka dapat digambarkan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya semakin baik. Berikut rumus untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan perhitungan rasio dan grafik atas Efektivitas Pengelolaan PAD selama 5 tahun:

$$2017 = \frac{1.337.231.094.232}{1.484.865.937.000} \times 100\% = 97,1\%$$

$$2018 = \frac{1.185.453.010.989}{1.503.411.219.000} \times 100\% = 78,8\%$$

$$2019 = \frac{1.303.316.337.553}{1.624.776.235.586} \times 100 = 80,2\%$$

$$2020 = \frac{1.078.328.561.269}{1.144.166.180.881} \times 100\% = 94,2\%$$

$$2021 = \frac{1.140.328.483.697}{1.326.375.011.303} \times 100\% = 85,9\%$$



Gambar 4. 4

Perbandingan Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Hasil data diatas merupakan perhitungan rasio dan grafik tren selama 5 tahun atas Efektivitas Pengelolaan PAD Kota Makassar. Hasil perhitungan rasio menunjukkan kriteria berbeda pada tahun tertentu. Tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD berkisar 90% - 99% menunjukkan kriteria cukup efektif. Tahun 2018,2019 dan 2021 menunjukkan hasil rasio yang berkisar 75% - 89% menunjukkan kriteria

yang kurang efektif untuk pengelolaan PAD pada tahun tersebut. Grafik juga menunjukkan tiap tahunnya efektivitas pengelolaan PAD mengalami naik dan turun. Tertinggi pada tahun 2017 dengan angka 97,1% dan yang paling rendah pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 78,8%.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama yang ditemukan dalam penelitian yaitu pendapatana sli daerah yang masih belum dioptimalkan terjadi karena pengawasan yang sangat kurang. Pengawasan yang dilaksanakan sebagai kepastian atas PAD sangat dibutuhkan untuk memonitor pelaksanaan penghimpunan potensi daerah. Kota Makassar sendiri sesuai dengan laporan keuangan pada LRA selama 5 tahun sangat rendah akan pendapatan retribusi daerah. Hambatannya terjadi karena kurangnya pengawasan langsung di lapangan untuk menghimpunnya. Kekuatan pendapatan daerah Kota Makassar masih kuat adanya sumbangan positif dari pendapatan transfer untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terlebih khusus retribusi daerah yang sangat rendah pemasukannya terjadi karena sangat kurang pengawasannya secara langsung di lapangan. Sehingga realisasi PAD tersebut sangat jauh dari capaian target dengan tercapainya pendapatan asli daerah menuju capaian target akan sangat mengangkat kinerja keuangan kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat temuan juga bahwa banyak masyarakat yang menunda kewajiban retribusi karena administrasi yang berbelit. tata cara dan mekanisme yang diberikan wajib retribusi penuh dengan dokumen dan menurut masyarakat sangat memotong waktu membuat masyarakat menunda kewajibannya tersebut. Hasilnya retribusi yang diterapkan di Kota Makassar sangat rendah. Perlunya sinkronisasi dengan teknologi untuk membayar retribusi ini dilakukan agar bisa mempercepat proses retribusi. Misalnya seperti pembayaran melalui teknologi barcode yang di scan dengan mudah menjadikan retribusi akan mudah didapatkan. Kartu khusus pemungutan retribusi juga sebagai alat yang bisa discan bisa digunakan agar mengembangkan optimalisasi pendapatan retribusi.

Pemerintah Kota Makassar disini mulai bergantung pada Pendapatan transfer atas kekurangan anggaran yang ada. Terlihat pada titik ketergantungan tersebut menjadikan kinerja keuangan tidak optimal dalam menghimpun potensi daerah. Tren 5 tahun atas Pendapatan Asli daerah telah menjawab kondisi ketergantungan ini dengan pendapatan yang tidak mencapai target. Hasilnya Pendapatan Asli Daerah masih terlepas begitu saja padahal bisa dioptimalkan.

IV. KESIMPULAN

Kinerja keuangan Kota Makassar telah diukur melalui hasil analisis perhitungan rasio. Perhitungan yang telah dilakukan bahwa kinerja keuangan Kota Makassar mengalami berbagai hasil yang menentu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan keuangan Kota Makassar dikategorikan sedang dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengujian terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah selama 5 tahun menunjukkan angka kategori presentase berkisar 30% hingga 40%. Perhitungan rasio ketergantungan daerah Kota Makassar atas perhitungan indikator Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah menunjukkan angka sebesar 60% secara keseluruhan. Hasil tersebut jika dihubungkan dengan Kriteria ketergantungan termasuk sangat tinggi menurut hasil perhitungan rasio termasuk pada kriteria presentase >50,00. Hasil perhitungan atas rasio kemandirian daerah menunjukkan angka yang berkisar pada 50-75%. Artinya selama 5 tahun kemandirian daerah Pemerintah Kota Makassar dikategorikan sedang dengan pola hubungan yang bersifat partisipatif. Artinya kemandirian keuangan Kota Makassar lumayan mampu melaksanakan otonomi daerah. Perhitungan rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar menunjukkan menunjukkan kriteria berbeda pada tahun tertentu. Tahun 2017 dan tahun 2020 menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD berkisar 90% - 99% menunjukkan kriteria cukup efektif. Tahun 2018,2019 dan 2021 menunjukkan hasil rasio yang berkisar 75% - 89% menunjukkan kriteria yang kurang efektif untuk pengelolaan PAD pada tahun tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga tidak terlalu meninjau secara langsung yang terjadi di pada proses pemungutan pendapatan asli daerah. Penelitian ini hanya meninjau pada data yang ditemukan pada laporan keuangan dan berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian. Penulis berharap pada peneliti yang baru lebih fokus dengan menampakkan kejadian secara langsung pada proses pemungutan pendapatan asli daerah. Kejadian yang ditemukan pada lapangan tentunya akan sangat lebih bermakna dalam mengumbar apa saja akar masalah yang mengurus potensi daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta

Dahliah, Dahliah. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto." (*CESJ*) *Center Of Economic Students Journal* 2.3 (2019): 204-218.

Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*, 22(2).

Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23-34.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



